

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kaloh. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Studi Hukum FHUI, 2000.
- , 2001. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Sinar Harapan.
- Sadjono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbag, Pressindo, 2008.
- Saleh, Muhammad Reddynoor Jaya. "Kajian Pengangkatan Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, Dan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." Universitas Sriwijaya, 2023.
- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelakar Offset, 2018.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Umar. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Gennta Publishing, 1997.

B. Jurnal

- Ananda, Ega. 2025. "Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2 (2).
- Arnazaye, Furaihan KamyI, Ariq Nabil Sulaiman, and Muh Imam Kastholani. "Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Perpektif Demokrasi Dan Teknokrasi." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 17, no. 1 (2023).
- Ashari. 2024. "Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (1).

- Bataha, Katerina. "Dampak Kebijakan Mutasi Jabatan Struktural Dalam Pelayanan Publik." *Jastiswara* 2, no. 4 (2013)
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. "Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra Dan Pasca Pilkada Serentak)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2015)
- Fachrurroji, Moch. 2008. "TRILOGI KEPEMIMPINAN ISLAM: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah." *Ilmu Dakwah* 4 (12).
- Ferizko, Adia. "Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatab Struktural." *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 5 (2022).
- Ferizko, Adia. 2016. "Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural." *Jurnal Niara* 8 (2).
- Giyanto, Bambang. "Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik." *Hukum Dan Keadilan* 3, no. 5 (2021).
- Hayati, Muslimah. "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah." *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021)
- Hermawan, Wawan, and Sedarmayanti. "Implikasi Iklim Organisasi, Mutasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di BKPSDMK Kabupaten Subang." *Jurnal Ilmu Administrasi* 17, no. 2 (2020)
- Iskandar, Heri. "Kewenangan Penjabat Bupati Dalam Melakukan Mutasi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 2 (2023)
- Kurnia, Fabian Riza, and Rizari. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana." *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no. 2 (2019)
- LAN, Tim PKP2A III. "Kewenangan Dekonsentrasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Permasalahan Penyelenggaraannya Di Daerah." *Jurnal Borneo Administrator* 3, no. 6 (2021)
- Manengkey, Mario Ferdinandus. "Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) Gubernur Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015)
- Mugni, Rusdin Arifin Al, dan Atep Abdurrafiq. "Politik Hukum Penentuan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah Pusat (Studi Kasus Provinsi Banten Dan Provinsi Aceh)." *Jurnal Isamic Constitutional Law* 1, no. 2 (2023)

- Pamungkas, Catur Agil, dan Anmo Wahyu Asmorojati. “Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.” *Media Of Law And Sharia* 4, no. 2 (2023)
- Rahmazani. 2023. “Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024.” *Jurnal Konstitusi* 20 (2).
- Rokilah. (2020). The Role of the Regulations in Indonesia State System. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 31.
- Rundengan, Shinta, Riane Johnly, dan Max Pangkey. “Pengaruh Mutasi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.” *Jambura Law Review* 4, no. 6 (2021)
- Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (4).
- Sindar, Syaloom Novelya Caren. 2024. “Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Pemberian Mutasi Aparatur Sipil Negara.” *Lex Crimen* 12 (5).
- Utami, Tanti Kirana, Ardelia Lananda, and Cindy Claudia Simbolon. 2024. “Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sitem Hukum Indonesia.” *Umel Mandiri* 5 (2).
- Wahyudi, Amar, dan Fauzi Syam. “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” *Halu Oleo* 3, no. 3 (2022)

C. Sumbel Lainnya

- Bornegoid, Admin. “Perbedaan Istilah Plt, Pjs, Plh Dan Pj Kepala Daerah.” BONE.GO.ID, 2018. <https://bone.go.id/2018/03/27/perbedaan-istilah-plt-pjs-plh-dan-pj-kepala-daerah/>.
- Hasya, Raihan. 2022. “Ada 271 Kepala Daerah Yang Masa Jabatannya Habis Sebelum Pilkada Serentak 2024, Siapa Penggantinya?” GoodStats. 2022. <https://goodstats.id/article/ada-271-kepala-daerah-yang-masa-jabatannya-habis-sebelum-pilkada-serentak-2024-siapa-penggantinya-ggj7l>.
- Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. “Kementerian PUPR Tetapkan 3 Surat Edaran Untuk Tertib Izin Pengusahaan Dan Penggunaan SDA.” Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2017. https://sda.pu.go.id/post/detail/kementerian_pupr_tetapkan_3_surat_edaran_untuk_tertib_izin_pengusahaan_dan_penggunaan_sda.
- Kusnandar, Viva Budy. “271 Kepala Daerah Akan Lengser Sebelum Pilkada 2024.” Databoks, 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/7d6fd9408dc161e/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024>.

Meritopedia. (2023). *Sistem Merit Dalam Manajemen ASN*. Meritopedia. <https://meritopedia.kasn.go.id/tentang-sistem-merit>

Munawaroh, Nafiatul. "Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum." *Hukum Online. Com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>.

Mutiarasari, Kanya Anindita. "Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang, Apa Saja?" *Detik News*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5947203/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-undang-apa-saja>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Karyawan Menolak Mutasi, Ini Akibat Hukumnya." *Hukum Online.com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/karyawan-menolak-mutasi--ini-akibat-hukumnya-lt5f577001d67a6/>.

Online, Tim Hukum. 2023. "3 Asas Otonomi Daerah Dan Penjelasannya." *Hukum Online. Com*. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543/>.

Online.Com, Hukum. "Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Hukum Online.Com*, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/?page=1&_gl=1*x0g8y*_up*MQ..*_ga*MjExMzcyMDQwMi4xNzUxOTQ5Mzc2*_ga_XVDEV3KKL2*czE3NTE5NDkzNzUkbzEkZzEkDDE3NTE5NDk1MzYkajYwJGwwJGgw.

Qothrunnada, Kholida. "Desentralisasi Sebagai Sistem Pemerintahan Begini Penjelasannya." *Detik.com*, 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5826007/desentralisasi-sebagai-sistem-pemerintahan-begini-penjelasannya>.

Pasha, Karisna Mega. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hukum Online. Com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturanperUndang-Undang-an-di-indonesia-cl4012/>.

Priyasmoro, Muhammad Radityo. 2022. "HEADLINE : Pejabat Gubernur Bisa Copot Dan Mutas Pegawai Tanpa Izin Kemendagri, Rawan Semena-Mena?" *Liputan 6*. 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5077100/headline-pejabat-gubernur-bisa-copot-dan-mutasi-pegawai-tanpa-izin-kemendagri-rawan-semena-mena>.

Sutarto, Suryo. "Kepala Daerah." *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*, 22AD. <https://pajak.go.id/id/kepala-daerah#:~:text=Pemerintah>

daerah adalah Gubernur%2C Bupati%2C atau Walikota%2C,disebut bupati%2C dan untuk kota disebut walikota.

Zaman, N. 2024. *Mengenal Peraturan Kebijakan dan Kedudukannya*. Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-peraturan-kebijakan-dan-kedudukannya-lt65b0fb2e6e0f9/>